



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI**

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: RDPU
Sifat Rapat	: <b>Terbuka</b>
Hari/tanggal	: Selasa, 31 Mei 2011
Pukul	: 13.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Konsultasi tentang perkembangan pembahasan RUU BPJS; 2. Lain-lain.
Ketua Rapat	: dr. Ahmad Nizar Shihab, Sp.An/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Tamu Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Jumlah Kehadiran	: 10 orang, terdiri dari : 1. dr. Ahmad Nizar Shihab, Sp.An (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI) 2. Ir. Arif Minardi (Anggota Komisi IX DPR RI); 3. Siti Mufatahah, S.Psi (Anggota Komisi IX DPR RI); 4. Ir. Endang Kahfi, MM (Anggota Komisi D DPRD Kab. Garut); 5. H. Majmudin (Anggota Komisi D DPRD Kab. Garut); 6. H. Alit Suherman (Anggota Komisi D DPRD Kab. Garut); 7. Agung Acung (Anggota Komisi D DPRD Kab. Garut); 8. Euis Komariyah (Anggota Komisi D DPRD Kab. Garut); 9. Euis Idawartiah (Anggota Komisi D DPRD Kab. Garut); 10. Jajang Taufiq (Dinas Sosial-Kab. Garut)

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Garut Jawa Barat dibuka pukul 13.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. DPRD Kab. Garut minta penjelasan mengenai perkembangan pembahasan RUU tentang BPJS, termasuk masalah pembahasan yang alot.
2. DPRD Kab. Garut mempertanyakan apakah memungkinkan pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai implementasi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional sudah cukup kuat untuk mengcover Sistem Jaminan Sosial Nasional, tanpa harus membentuk lembaga BPJS.

3. DPRD Kab. Garut mengkhawatirkan bila RUU BPJS disahkan menjadi UU BPJS dan terbentuk lembaga BPJS, dikhawatirkan terjadi tumpang tindih dalam hal penarikan iuran kepada masyarakat, khususnya para pekerja, yang sebelumnya telah mengiur dananya ke PT. Jamsostek.
4. DPRD Kab. Garut mempertanyakan efektivitas penarikan iuran BPJS kepada masyarakat serta adanya perbedaan data masyarakat miskin versi BPS dan versi Pemerintah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan oleh petugas di lapangan.
5. DPRD Kab. Garut mengharapkan dukungan Komisi IX DPR RI untuk membantu pengembangan Rumah Sakit Pamempeuk Garut, yang saat ini mengalami kekurangan fasilitas, alat kesehatan dan SDM. Apabila Rumah Sakit Pamempeuk Garut dapat beroperasi dengan maksimal diharapkan dapat mencegah penumpukan pasien yang selama ini berobat di RSU Garut.

### III. CATATAN PENTING

1. Pembahasan RUU BPJS antara DPR RI dan pihak Pemerintah mengalami banyak kemajuan, diantaranya adanya kesamaan pandangan terkait RUU yang bersifat pengaturan, BPJS berbadan hukum publik (dengan semangat pengelolaan dana wali amanah). Badan yang dibentuk multi atau tunggal masih dalam pembicaraan lanjutan.
2. Pada saat BPJS akan berjalan, maka pemerintah sudah harus melaksanakan pendataan kependudukan yang bersifat nasional (*single identity number*), sehingga data yang dipakai lebih akurat dan tidak tumpang tindih, berdasarkan *azas by name by address*.
3. Komisi IX DPR RI meminta agar DPRD Kab. Garut melengkapi data pendukung sebagai bahan masukan untuk memperjuangkan pengembangan RS. Pamempeuk Garut di Badan Anggaran melalui usulan APBNP Kementerian Kesehatan.

Rapat diakhiri pukul 14.05 WIB.

**PIMPINAN KOMISI IX DPR RI**

Wakil Ketua,



dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An